



Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur 2016 – 2022

Anindya Zahra Meiriana¹, Sahastian Ayu Kusumaningtyas²,

Annisa Latifa Pangestuti³

Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

Email: aninmeiriana@gmail.com, sahastian.ayu@gmail.com, annisalatifa188@gmail.com

Abstract. *The challenges faced by Bojonegoro and Tuban counties are high poverty rates and inadequate infrastructure, which continue to occur year after year. The large budgets for Regional Original Income (PAD), General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK) and Balancing Funds (DP) are some of the reasons why Bojonegoro Regency and Tuban Regency have infrastructure and poverty problems. This research is quantitative using panel data regression and processed using E-Views 12 to examine the relationship between variables. The results of this research are that the levels of Regional Original Income (PAD), General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK) and Balancing Funds (DP) have a significant positive impact on regional spending.*

Keywords: PAD, DAU, DAK, Regional Expenditures

Abstrak. Tantangan yang dihadapi di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban adalah tingginya angka kemiskinan dan infrastruktur yang tidak memadai yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Besarnya anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Perimbangan (DP) merupakan beberapa hal bahwa Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban mempunyai persoalan infrastruktur dan kemiskinan. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan regresi data panel dan diolah menggunakan E-views 12 guna menelaah hubungan antar variabel. Hasil dari penelitian ini yaitu jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Perimbangan (DP) memiliki dampak yang positif signifikan terhadap belanja daerah.

Kata kunci: PAD, DAU, DAK, Belanja Daerah

A. PENDAHULUAN

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pemerintah daerah sudah mampu mengendalikan dan mengawasi keuangannya untuk kepentingan umum. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia, mempunyai beragam kabupaten dan kota, yang masing-masing memiliki suasana dan ciri khas tersendiri seperti pertanian, perkebunan, industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa merupakan sektor ekonomi primer. Lokasi tertentu mungkin memiliki spesialisasi ekonomi tertentu, seperti industri pariwisata di wilayah pesisir dan sektor pertanian di wilayah pedalaman. Pembatasan anggaran dapat berdampak di sebagian wilayah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur, sehingga menyulitkan pendanaan layanan publik dan inisiatif pembangunan yang penting.

Pembatasan anggaran dapat berdampak di sebagian wilayah kabupaten atau kota Provinsi Jawa Timur, sehingga menyulitkan pendanaan layanan publik dan inisiatif pembangunan yang penting. Pendapatan daerah yang terbatas, ketergantungan pada pendanaan

yang diberikan dari pemerintah pusat, dan kemampuan internal yang tidak memadai mampu menyebabkan hal ini. Menentukan tujuan pembangunan yang sesuai dan efisien merupakan dilema khas yang dihadapi oleh beberapa kabupaten dan kota. Hal ini berkaitan dengan beragamnya kebutuhan masyarakat setempat dan keterbatasan keuangan. Masalah yang terkait dengan efisiensi penggunaan keuangan publik seperti pengelolaan keuangan publik yang mungkin melibatkan pemborosan, penyalahgunaan, atau kurangnya tanggung jawab sehingga semuanya dapat menghambat pencapaian hasil pembangunan yang diharapkan. Ada kemungkinan bahwa sejumlah besar kabupaten dan kota terlalu terikat pada dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Ketergantungan ini dapat menghambat kemandirian keuangan daerah dan menjadikan daerah lebih rentan terhadap perubahan kebijakan pemerintah pusat. Mungkin terdapat perbedaan dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di berbagai kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat mengakibatkan disparitas akses daerah terhadap layanan publik dan prospek perekonomian. Oleh karena itu, perencanaan anggaran yang hati-hati seperti pengelolaan yang efektif dan transparan, serta hubungan positif dengan pemangku kepentingan terkait pada pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat sipil sangat penting bagi pemerintah daerah di Jawa Timur. Inisiatif pembangunan selanjutnya dapat dilakukan secara efisien dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat pada wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur.

Bojonegoro dan Tuban adalah wilayah Kabupaten yang berada di Jawa Timur, masing – masing daerah memiliki kekayaan alam tersendiri yang menyongsong pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Kabupaten Tuban sendiri merupakan daerah yang berada pada pesisir pantai, sehingga tidak dapat dipungkiri tidak sedikit penduduk tuban yang memiliki penghasilan yang berkaitan dengan pantai dan laut. Lokasi yang berada di area pesisir, maka pendapatan daerah Tuban pun juga berasal dari kekayaan alam tersebut. Hal ini merupakan perbedaan yang signifikan apabila dibandingkan dengan Bojonegoro dan juga kekayaan alamnya. Permasalahan lain yang sering muncul di Kabupaten Tuban adalah rendahnya PAD yang dimiliki, DAU, dan DAK untuk membiayai belanja daerah. Tidak ada dasar hukum untuk memungut pajak, dan sebagian masyarakat memilih untuk tidak membayar pajak, sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan kota.

Keadaan perekonomian Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan membaik sehingga banyak menarik investor untuk membangun pasar dan hotel di wilayah tersebut. Namun, dana belanja daerah yang bersumber dari PAD, DAU dan DAK tidak mencukupi. Pendapatan awal

daerah yang tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran daerah menjadi salah satu permasalahan yang sering dihadapi Kabupaten Bojonegoro. Sehingga kurangnya dana daerah dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan program pemerintah, termasuk kesehatan, pendidikan, dan perbaikan jalan. Permasalahan umum lainnya adalah tidak tersedianya cukup DAK dan DAU untuk mendukung belanja daerah. Operasi pemerintah seperti perbaikan jalan, pendidikan, dan layanan kesehatan mungkin tertunda karena kurangnya DAU maupun DAK. Perbaikan pendapatan daerah, DAU dan DAK diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan non-fisik yang bersumber dari perkebunan, perikanan, dan industri lokal. Selain itu, langkah-langkah harus diambil untuk mengurangi belanja daerah yang tidak diperlukan.

Pemasukan yang didapat pada pendapatan daerah atau keuangan yang akan digunakan untuk menunjang Kabupaten Bojonegoro antara lain PAD. Selain PAD sejumlah sumber keuangan daerah antara lain DAU, DAK, dan DP memiliki fungsi yang utama pada penyumbang pembangunan daerah di wilayah Bojonegoro. Masing – masing dana memiliki peran dan kegunaan tersendiri untuk memajukan wilayah Bojonegoro. Bojonegoro merupakan daerah yang memiliki kekayaan migas yang dapat menghasilkan jutaan barel setiap tahunnya, kekayaan alam tersebut mempengaruhi pendapatan daerah di Bojonegoro. Hal tersebut juga akan mempengaruhi penambahan pendapatan yang bersumber dari PAD. Menurut Abdul Halim (2004), PAD merupakan pendapatan biaya dari pajak, retribusi daerah, dan juga berasal dari kekayaan alam yang dimiliki wilayah tersebut. Selain PAD, antara lain DAU, DAK, DP. Masing – masing dana memiliki peran dan kegunaan tersendiri untuk memajukan wilayah Bojonegoro.

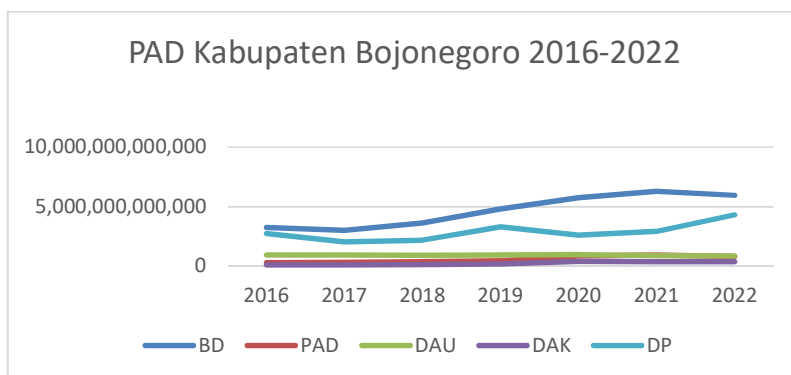
Uang untuk pelayanan publik dan berbagai inisiatif pembangunan berasal dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah melalui DAU. Mengevaluasi efektivitas penggunaan dana tersebut dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah dilakukan dengan menganalisis dampak DAU terhadap belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah Bojonegoro diperkirakan mayoritas bersumber dari sektor perkebunan dan pertanian, dengan sedikit kontribusi dari industri energi (gas alam dan minyak bumi, misalnya). Di sisi lain, perubahan harga komoditas dan kesulitan meningkatkan hasil pertanian dapat berdampak besar terhadap pendapatan daerah. Pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada kabupaten dan kota dalam rangka membantu pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. Bojonegoro dapat diberikan DAU sesuai dengan metode yang telah ditentukan dengan memperhitungkan variabel-variabel seperti luas wilayah, jumlah penduduk, dan indikasi lainnya. Namun, kabupaten/kota tersebut mungkin tidak dapat

mengelola DAU dengan baik karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia setempat. Kabupaten Bojonegoro harus memastikan pengalokasian anggaran dilaksanakan dengan baik dan efisien untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah dengan cara mengaitkan pendapatan daerah dan dana yang diterima dengan belanja daerah. Hal ini memerlukan perencanaan yang hati-hati, administrasi yang terbuka, dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana publik.

Dana alokasi khusus ialah dana yang disiapkan guna mengatasi permasalahan tertentu, misalnya penanganan masalah pendidikan, subsidi dan lain sebagainya. Dana ini tidak boleh digunakan untuk hal lain selain rencana dari anggaran tersebut. Menurut Kuncoro (2012), dana alokasi khusus diberikan ke suatu daerah yang memang memerlukan dana tersebut untuk menyongsong aktivitas yang memiliki sifat khusus atau spesifik yang setara dengan pengutamaan nasional. Di Kabupaten Tuban, uang yang diperuntukkan bagi alokasi umum dan khusus dicairkan berdasarkan ketentuan dan kebutuhan yang berlaku. Namun, ada persoalan di Kabupaten Tuban, yakni pengurangan uang alokasi khusus. Perbaikan pendapatan daerah, DAU, dan DAK diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini.

Dalam skala provinsi, wilayah Bojonegoro berada pada peringkat ke enam dalam anggaran realisasi belanja. Diatas Bojonegoro ditempati oleh wilayah Surabaya. Hal ini bisa terjadi dikarenakan kebutuhan antara wilayah Bojonegoro dan wilayah Surabaya berbeda antara satu sama lain. Pendapatan yang diperoleh oleh masing – masing wilayah juga berbeda. Perbaikan harus dilakukan pada pendapatan daerah, DAU, dan DAK untuk membantu mengatasi masalah ini. Selain itu, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan non-fisik yang bersumber dari perkebunan, perikanan, dan industri local sebab langkah-langkah tersebut harus diambil untuk mengurangi belanja daerah yang tidak diperlukan.

Berdasarkan data BPS Jawa Timur sumber keuangan daerah Bojonegoro yang berasal dari PAD, DAU, DAK, dan DP dari 2016 - 2019 setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, pada pendapatan yang bersumber dari DP sempat mengalami penurunan yaitu pada tahun 2020, setelah itu pendapatan daerah kembali mengalami peningkatan.



Gambar 1. Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro 2016 – 2022

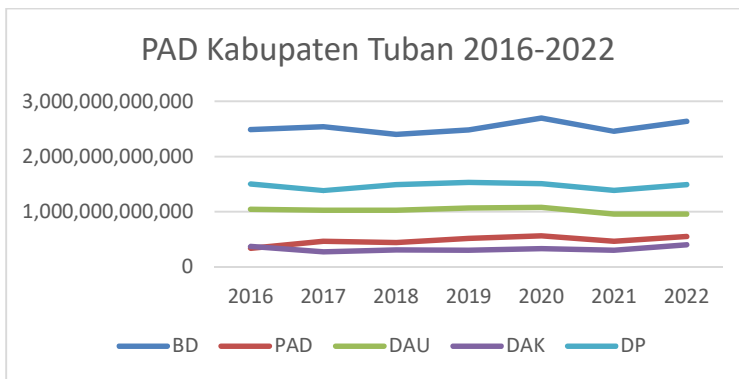
Sumber: BPS Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur

Informasi pada grafik diatas menunjukkan bahwa sumber keuangan daerah yang berasal dari PAD, DAU, DAK serta DP dari 2016 - 2022 tiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan. Namun, mengalami penurunan pendapatan DAU, DAK, dan DP pada tahun 2020 – 2021 dikarenakan pandemi Covid-19, setelah itu pendapatan daerah kembali mengalami peningkatan.

PAD sendiri merupakan pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya tergantung dengan kondisi daerah terkait. Pada daerah Bojonegoro PAD terus terjadi peningkatan sejak tahun 2016 hingga tahun 2017. Pada tahun 2016 mengalami sedikit kemerosotan sekitar 1% yang pada 2016 bernilai 291.326.995.402 menjadi 290.865.000.000. Pada 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 329.003.732.182, angka ini jauh melebihi dari pada tahun lalu.

Diantara semua sumber penerimaan, dana paling banyak berasal dari dana perimbangan, yang mana dana perimbangan itu sendiri berasal dari APBN negara. Apabila dibandingkan antara DAK, DAU, dan PAD maka rata – rata penyumbang pendapatan terbesar adalah dana alokasi umum. Daerah Kabupaten Bojonegoro menerima dana belanja daerah yang digunakan untuk meningkatkan pendidikan, membangun infrastruktur, menutup kesenjangan kemiskinan di daerah, dan tujuan lainnya. Pembagian belanja daerah berdasarkan pada kemampuan dan kebutuhan dalam penyediaan sumber daya. Namun ada persoalan di Kabupaten Bojonegoro, yakni pengurangan uang alokasi khusus dengan berkurangnya dana alokasi khusus dapat menjadi permasalahan yang akan dihadapi Kabupaten Bojonegoro. Sehingga perlu perbaikan pendapatan daerah, DAU, dan DAK sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Selain itu, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan non-fisik dan mengembangkan usaha local yang bersumber dari perkebunan, perikanan, dan

industri lokal. Selain itu, langkah-langkah harus diambil untuk mengurangi belanja daerah yang tidak diperlukan.



Gambar 2. Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban 2016 – 2022

Sumber: BPS Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur

Menurut gambar diatas pada Kabupaten Tuban, dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tuban pada tahun 2016 – 2017 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan PAD Bojonegoro. Pada tahun 2016, perbedaan pendapatan antara 2 Kabupaten tersebut tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2017 terdapat perbedaan pendapatan yang cukup signifikan dengan perolehan pendapatan yang didapatkan oleh Kabupaten Tuban sebesar 462.826.997.687 sedangkan pada wilayah Bojonegoro sebesar 329.003.732.182.

DAU dan DAK pada Kabupaten Tuban terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah DAU dari kedua Kabupaten tersebut tidak jauh berbeda jumlahnya. Namun, pada DAK jumlah di Kabupaten Tuban lebih besar apabila dibandingkan dengan Kabupaten Bojonegoro. Jumlah DAK tertinggi Tuban berada pada tahun 2022 yaitu sebesar 399.734.331.528 sedangkan jumlah DAK tertinggi Kabupaten Bojonegoro berada pada tahun 2022 dengan total jumlah DAK sebesar 375.500.759.

Dana perimbangan yang didapat Kabupaten Tuban lebih sedikit apabila dibandingkan dengan dana perimbangan Kabupaten Bojonegoro. Dana perimbangan Kabupaten Tuban tertinggi diperoleh pada tahun 2019 dengan dana sebesar 1.529.633.733.214 dan dana perimbangan Bojonegoro tertinggi pada tahun 2022 dengan jumlah dana perimbangan 4.326.959.404.057. Angka ini jauh berbeda dengan angka yang diperoleh oleh kabupaten Bojonegoro.

Pada tahun 2022, sebagai pemerintah daerah, Bojonegoro mendapat pengakuan dari Kementerian Dalam Negeri dengan penghargaan memiliki realisasi pendapatan daerah (APBD) tertinggi, peringkat pertama di antara kabupaten se-Jawa Timur. Tingkat realisasi pendapatan APBD sebesar 137,06%, tetapi Bojonegoro juga termasuk peringkat kedua dengan

tingkat kemiskinan tertinggi se-Jawa Timur. Sedangkan Kabupaten Tuban menduduki peringkat 10 pada kategori Realisasi Pendapatan Daerah APBD terendah di tingkat kabupaten se Jawa Timur.

Maka dari itu menarik untuk mengetahui atau mempelajari lebih jauh mengenai dampak pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah serta dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan. yang menyebabkan mengapa tingkat kemiskinan di Bojonegoro dan Tuban masih tinggi padahal dua kabupaten tersebut memiliki realisasi APBD yang cukup jauh akan tetapi memiliki permasalahan ekonomi yang sama pada kemiskinan. Diharapkan pemerintah Kabupaten Tuban dan Bojonegoro dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini agar dapat mengoptimalkan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran di setiap sektor sehingga kesejahteraan dan pemerataan sosial bisa terwujud.

Penelitian yang dilakukan oleh Suhirman (2013) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan.

Kajian yang dilakukan oleh (Darmayuda et al., 2015). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, namun pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus semuanya berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Penelitian terdahulu yang mengkaji Penelitian dari Dwi Saputra, Andi Wijaya, dan Yusuf Nugraha menguji pengaruh pendapatan asli daerah, DAU, DAK, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban Provinsi Jawa Timur. Studi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, pendapatan asli daerah, DAK, dan dana perimbangan mempunyai pengaruh yang baik terhadap belanja daerah.

Temuan Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, Salmah Pattisahusiwa, dan tim peneliti menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur secara bersamaan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Setelah meninjau beberapa makalah, peneliti menemukan beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang telah dilaksanakan.

“Dampak Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah” demikian judul artikel pertama Ferdiansyah (2018) yang berhasil ditemukan. Penelitian ini bertujuan guna menunjukkan bagaimana secara langsung Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan berpengaruh akan belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Data penelitian diperoleh melalui pemanfaatan data sekunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perimbangan uang dan PAD mempunyai dampak yang signifikan akan belanja daerah. Sementara DAU dan DAK berdampak kecil akan belanja daerah.

Fatimah (2020) penelitian kedua yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana dampak pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. Data diperoleh melalui data sekunder. Penelitian ini menyatakan bahwa DAU dan PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Sementara DAK dan DBH tidak terlalu mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah.

Dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013), Rihfenti Ernayani (2017) melakukan penelitian ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk memahami melalui metodologi empiris, dampak dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan daerah akan belanja kabupaten dan kota daerah di provinsi Kalimantan Timur. Sebanyak 58 titik data dipelajari pada penelitian ini, yang memakai data primer untuk pengumpulan data dan data sampling untuk pemilihan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan PAD memiliki dampak yang signifikan akan belanja daerah.

Kajian “Flypaper effect terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah” merupakan jurnal keempat yang dilakukan oleh Soeharjoyo (2019). Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memahami pengaruh daerah dari flypaper effect dan dana alokasi umum serta pendapatan daerah akan belanja daerah. Data diperoleh melalui data sekunder. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa PAD dan DAU memiliki dampak yang baik dan cukup besar terhadap belanja daerah.

“Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Daerah di Gatewaykertosusilo” merupakan judul penelitian Marthaza yang keenam pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menggambarkan dampak pajak daerah Pintu Kertosusila dalam rangka pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, daerah lain yang mempunyai pendapatan asli

daerah yang sah, dan dana perimbangan belanja daerah tahun 2017. Data diperoleh melalui data sekunder. Kesimpulan studi ini menunjukkan bahwa belanja daerah secara signifikan dan menguntungkan dipengaruhi oleh dana perimbangan, PAD lain yang sah, pajak daerah, dan pendapatan kekayaan yang dibagi oleh manajemen.

C. METODE PENELITIAN

Kajian ini antara lain menggunakan informasi kuantitatif mengenai pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan. Selain itu, data deret waktu atau geografis yang mencakup tahun 2016–2022 juga digunakan dalam penelitian ini. Data pustaka penelitian ini disediakan oleh Badan Pusat Statistik dan website Kementerian Keuangan berdasarkan informasi dari dua kabupaten di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 hingga 2022. *EViews 12* digunakan untuk menganalisis indikator-indikator yang mempengaruhi proporsi belanja daerah sehingga diperoleh hasil koefisien melalui uji f dan uji variabel. (uji t), serta dengan menggunakan asumsi tradisional seperti heteroskedastisitas, multikolinearitas dan normalitas.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban Provinsi Jawa Timur dinilai dalam penelitian ini dengan menggunakan regresi data panel tahun 2016–2022. Uji Chow dapat digunakan untuk memilih model terbaik antara model CEM dan FEM ketika melakukan estimasi. Saat memperkirakan dengan data panel pada pengujian Hausman, Chow, dan LM dapat digunakan untuk menilai akurasi model antara CEM, FEM, atau REM (Gujarati & Porter, 2012).

Model regresi dalam penelitian ini adalah :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + \varepsilon_{it} \quad 1$$

Keterangan :

Y = Belanja Daerah

X1i = PAD

X2i = DAU

X3i = DAK

X4i = DP

β_0 = Intersept

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5$ = merupakan penduga (koefisien regresi) pada model persamaan

ε_i = eror terms

it = Panel

Sedangkan model persamaan fungsional penelitian dinyatakan dalam perumusan 2.

$$\text{Belanja Daerah} = f(\text{PAD, DAU, DAK, DP}) \dots \dots \dots 2$$

Model persamaan empiris penelitian ini dinyatakan dalam persamaan 3.

$$\text{Belanja Daerah}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{PAD}_{it} + \beta_2 \text{DAU}_{it} + \beta_3 \text{DAK}_{it} + \beta_4 \text{DP}_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots 3$$

Keterangan :

Belanja Daerah = jumlah anggaran biaya daerah

PAD = jumlah pendapatan asli daerah

DAU = jumlah anggaran dana alokasi umum

DAK = jumlah anggaran dana alokasi khusus

DP = jumlah anggaran dana perimbangan

Persamaan data panel harus melalui banyak tahapan analisis data sebelum perhitungan perkiraan dapat dilakukan. Langkah pertama melibatkan pemilihan model yang paling sesuai dari Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan model mana yang terbaik.

Setelah model diidentifikasi, serangkaian uji asumsi klasik harus dilakukan. Uji pertama didasarkan pada anggapan umum bahwa korelasi antar variabel independen menunjukkan adanya multikolinearitas. Dalam penelitian ini, multikolinearitas tidak menjadi masalah jika nilai korelasi menunjukkan koefisien kurang dari 0,85, dan menjadi masalah jika nilai korelasi menunjukkan koefisien lebih besar dari 0,85. Uji Glejser, yang melibatkan regresi nilai absolut, kemudian dapat digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Kriterianya sebagai berikut: model tidak heteroskedastik jika nilai probabilitasnya lebih dari 0,05 (alpha 5%), dan heteroskedastik jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 (alpha 5%). Oleh karena itu, penelitian ini perlu mengatasi permasalahan multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas agar dapat dinyatakan lolos dari pelanggaran dan model dapat dikatakan telah BLUE (best linier unbiased estimator). Uji parsial T, uji F, dan koefisien determinasi (Adjusted R²) dilakukan sebagai bagian dari proses pengujian signifikansi. Tujuan uji signifikansi parsial disebut juga uji validitas pengaruh adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis varians yang dilakukan adalah uji signifikansi simultan (uji F) (ANOVA). Secara teori, hipotesis gabungan bahwa semua koefisien regresi secara bersamaan adalah nol diuji dengan menggunakan uji F. Koefisien determinasi (R²) merupakan salah satu uji yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif model dapat memperhitungkan variasi variabel dependen. Jika hampir seluruh informasi yang

diperlukan untuk memprediksi perubahan variabel terikat disediakan oleh variabel bebas maka nilai R^2 mendekati 1.

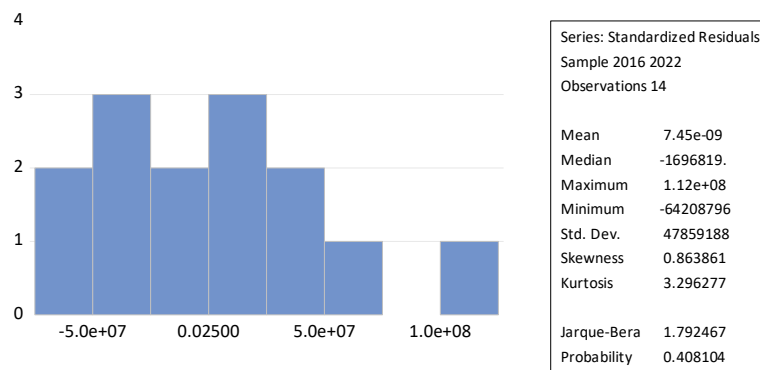
D. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Memverifikasi bahwa data yang diteliti mewakili populasi adalah tujuan dari uji normalitas dengan distribusi normal. Hal ini dapat diindikasikan ketika nilai p-value dari uji normalitas melebihi tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu lebih dari 5% atau 0,05.



Gambar 3. Hasil Uji Normalitas

Sumber : Hasil Output Uji Normalitas dengan Eviews 12

Berdasarkan temuan uji normatif pada Gambar 2 diperoleh nilai 0,374 > 10%. Oleh karena itu, distribusi datanya dapat dikatakan normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan uji kausalitas linier model regresi antar variabel penjelas. Para ahli menggunakan banyak teknik untuk memastikan apakah suatu model memiliki kolinearitas antar variabel independen. Jika koefisien memiliki nilai korelasi yang lebih tinggi, maka model pendekatan ini mempunyai kolinearitas jika nilai di atas 0,85. Tetapi jika koefisien korelasinya lebih rendah dari 0.85 maka dapat dikatakan tidak ada bagian multilinear atau tidak terjadi pelanggaran multikolinearitas. (Ajija at al, 2011).

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas

	PAD	DAU	DAK	DP
PAD	1.000000	0.122541	0.804647	0.588548
DAU	0.122541	1.000000	0.488349	-0.295031
DAK	0.804647	0.488349	1.000000	0.301892
DP	0.588548	-0.295031	0.301892	1.000000

Sumber : Hasil Output Uji Multikolinearitas dengan Eviews 12

Hal ini terbukti bahwa hasil korelasi parsial variabel independen seperti pada tabel 1 menunjukkan bahwa tidak terdapat permasalahan multikolinearitas pada model karena nilai matriks korelasi kurang dari 0,85.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk memastikan apakah terdapat varians residual dari observasi model regresi tunggal yang berbeda dari data lainnya, model dikatakan terjadi pelanggaran uji heteroskedastisitas jika hasil nilai probabilitas yang kurang dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05.

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 03/16/24 Time: 12:08
 Sample: 2016 2022
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 2
 Total panel (balanced) observations: 14

Variable	Coefficie			
	nt	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.87E+08	7.13E+08	0.261676	0.8002
PAD	-2.87E-05	0.000307	-0.093580	0.9277
DAU	-2.44E-05	0.000669	-0.036490	0.9718
DAK	-0.000254	0.000690	-0.367408	0.7228
DP	0.049325	0.063175	0.780774	0.4574

Sumber: Hasil Output Uji Heteroskedastisitas dengan Eviews 12

Hasil uji dapat dikatakan tidak terjadi pelanggaran uji heteroskedastisitas jika seluruh nilai probabilitas variabel berada di atas ambang batas signifikansi 5% maka dapat dikatakan lolos dari uji heteroskedastisitas.

2. Analisis Regresi

Tujuan dari pengujian ini dengan menggunakan EViews 12 bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Uji Chow merupakan

tahap awal pengolahan data yang mengidentifikasi model regresi di antara model acak (REM) dan model tetap (FEM) berikut hasil tes Chow:

Tabel 3. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	16.647403	(1,8)	0.0035
Cross-section Chi-square	15.753220	1	0.0001

Sumber: Hasil regresi data panel menggunakan Eviews 12

Model regresi pada hasil uji chow menghasilkan 0,0000, atau kurang dari 5%, berdasarkan temuan uji Chow pada Tabel 3. Maka dengan demikian, heterogenitas persamaan model yang tepat digunakan pada model ini adalah model efek tetap atau (FEM) pada saat hasil kurang dari taraf signifikan 5%.

$H_0 : \beta > 5\% = \text{CEM}$

$H_1 : \beta < 5\% = \text{FEM}$

Tabel 4. Hasil Regresi Fixed Effect Model

Berdasarkan hasil diatas maka dapat kita dapatkan model yang cocok digunakan adalah Uji heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas merupakan uji asumsi tradisional yang selanjutnya digunakan setelah fixed effect model (FEM).

Dependent Variable: BD

Method: Panel Least Squares

Date: 03/16/24 Time: 12:17

Sample: 2016 2022

Periods included: 7

Cross-sections included: 2

Total panel (balanced) observations: 14

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-9.03E+08	1.92E+09	-0.469446	0.6513
PAD	0.002984	0.000827	3.605860	0.0069
DAU	0.001332	0.001806	0.737485	0.4819
DAK	0.002701	0.001862	1.450672	0.1849
DP	0.386753	0.170446	2.269060	0.0530

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	1.98E+08	R-squared	0.979900
Mean dependent var	3.60E+09	Adjusted R-squared	0.967338
S.D. dependent var	1.45E+09	S.E. of regression	2.62E+08
Akaike info criterion	41.90365	Sum squared resid	5.49E+17
Schwarz criterion	42.17753	Log likelihood	-287.3255
Hannan-Quinn criter.	41.87829	F-statistic	78.00315
Durbin-Watson stat	1.834286	Prob(F-statistic)	0.000001

Sumber : Hasil Output regresi data panel Eviews 12

Dalam beberapa uji asumsi klasik dan statistik model yang digunakan dan lolos taraf signifikan 5% atau 10% maka dapat diasumsikan model dapat dikatakan telah BLUE (Estimasi Linier Tidak Bias Terbaik). Apabila ($\alpha=5\%$) menjadi variabel terikat, Dengan demikian, terdapat pengaruh yang besar dari variabel independen. Oleh karena itu, hasil pengujiannya memiliki angka lebih tinggi yaitu 0,967338. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 96,73% varians nilai variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 3,27% berasal dari sumber di luar model.

3. Hasil Interpretasi

a. Persamaan Regresi

Persamaan regresi data panel pada Tabel 4 di atas berasal dari temuan regresi dengan menggunakan mode fixed effect :

$$Y = -9.03E+0,002984 \text{ PAD}_{it} + 0.001332 \text{ DAU}_{it} + 0.002701 \text{ DAK}_{it} + 0.386753 \text{ DP}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Berdasarkan hasil interpretasi diatas maka dapat di simpulkan :

- Berdasarkan tanda positif pada koefisien regresi sebesar 0.00298 pada variabel PAD (X_1), Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban terdapat hubungan positif antara variabel PAD dengan belanja daerah. Hal ini menunjukkan kuantitas belanja daerah (Y) meningkat setiap satu juta PAD di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban akan bertambah sebesar 0.00298 juta.
- Berdasarkan tanda positif pada koefisien regresi sebesar 0.00133 pada variabel DAU (X_2), Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa variabel DAU dan belanja daerah pada Kabupaten Bojonegoro dan Tuban berkorelasi positif. Hal ini menunjukkan kuantitas belanja daerah (Y) meningkat setiap satu juta DAU di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban akan bertambah sebesar 0.00133 juta.
- Berdasarkan tanda positif pada koefisien regresi sebesar 0.00270 pada variabel DAK (X_3), Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa variabel DAK dan belanja daerah pada Kabupaten Bojonegoro dan Tuban berkorelasi positif. Hal ini

menggambarkan besarnya belanja daerah (Y) meningkat setiap satu juta kenaikan DAK di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban akan bertambah sebesar 0.00270 juta.

- d. Berdasarkan tanda positif pada koefisien regresi sebesar 0.38675 pada variabel Dana Perimbangan (X_4), Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel Dana Perimbangan dan Belanja Daerah pada Kabupaten Bojonegoro dan Tuban berkorelasi positif. Hal ini menunjukkan besarnya belanja daerah (Y) meningkat sebesar satu juta setiap kenaikan Dana Perimbangan di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban akan bertambah sebesar 0.38675 juta.

b. Uji t

Dari hasil perhitungan Uji t maka dapat kita ketahui bahwa :

1. Variabel PAD mempunyai kolerasi yang positif terhadap BD, maka dapat dianggap lulus uji t dengan nilai prob PAD sebesar 0,006, kurang dari kriteria signifikansi sebesar 5% atau 0,05.
2. Variabel DAU mempunyai pengaruh positif terhadap BD, dengan nilai prob DAU 0.481 lebih dari Uji t mungkin dianggap tidak berhasil atau gagal karena tidak memenuhi persyaratan nilai signifikan kurang dari 5%, atau 0,05.
3. Variabel DAK mempunyai pengaruh positif terhadap BD, maka dapat disimpulkan bahwa nilai prob DAK sebesar 0,184 tidak lolos uji t karena melebihi ambang batas signifikansi 5% atau 0,05.
4. Variabel DP memberikan korelasi positif terhadap BD, dengan nilai probabilitas DP sebesar 0,006, yang berada di bawah ambang batas signifikansi 5% atau 0,05.maka dapat dikatakan lolos uji t.

c. Uji F

Hasil uji F atau uji simultan yang ditampilkan pada Tabel 4 beserta hasil perhitungan regresi model fixed effect. Berdasarkan nilai probabilitas (F-Statistic) sebesar $0,000001 < \alpha 5\% (0,05)$, model persamaan penelitian dianggap dapat diterima atau memenuhi *goodness of fit*. Hal ini menunjukkan bahwa adanya dampak yang berasal dari gabungan atau secara individual dari PAD, DAU, DAK, dan DP terhadap BD.

d. Koefisien Determinan R^2

PAD, DAU, DAK, dan DP berkontribusi 96,73% pada belanja daerah, berdasarkan nilai adjusted R squared sebesar 0.9673. Sementara itu, faktor-faktor yang tidak termasuk dalam model menyumbang 3,27% dalam mempengaruhi BD.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Analisis regresi data panel menunjukkan bahwa belanja daerah berkorelasi positif dengan jumlah aktual uang yang dihasilkan daerah. Dengan hasil kurang dari 5% dikatakan lulus uji t, uji F, dan uji heterogenitas, sehingga menegaskan kesetaraan model FEM. Ambang batas signifikansi sebesar 5% atau 0,05 terlampaui oleh nilai probabilitas pendapatan daerah sebesar 0,0066. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah atau pendapatan daerah mempengaruhi belanja daerah. Artinya, peningkatan pendapatan asli daerah secara tidak langsung juga akan meningkatkan belanja daerah. Menurut Abdul Halim (2004), pendapatan asli daerah (PAD) pendapatan biata dari pajak, retribusi daerah, dan juga berasal dari kekayaan alam yang dimiliki daerah tersebut. selain pendapatan asli daerah, antara lain adalah dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana perimbangan (DP). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan asli daerah cenderung signifikan mempengaruhi belanja daerah yang ada di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro. Maka dari itu, pada daerah tersebut diperlukan adanya peningkatan kualitas SDM agar belanja daerah dapat terealisasikan dengan baik dan konkrit dengan yang seharusnya.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, jumlah dana alokasi umum sebesar 0.481 yang mengartikan bahwa angka tersebut tidak lolos pada uji t dengan kriteria, dikarenakan lebih dari 0.05 atau 5%. Secara hasil pengujian jumlah dana alokasi umum di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa secara hasil uji analisis peningkatan jumlah dana alokasi umum akan meningkatkan juga belanja daerah. Hal ini selaras dengan teori menurut Abdul Halim (2004), pendapatan asli daerah (PAD) pendapatan biata dari pajak, retribusi daerah, dan juga berasal dari kekayaan alam yang dimiliki daerah tersebut. Selain pendapatan asli daerah, antara lain adalah dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana perimbangan (DP). Pada teori tersebut menjelaskan bahwa penerimaan daerah (PAD, DAU, DAK, Dana Perimbangan) berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah (belanja daerah). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan mempengaruhi belanja daerah di Kabupaten Bojonegoro dan

Kabupaten Tuban. Maka dari itu, diperlukan adanya ketepatan dalam pengalokasian dana agar terdistribusikan dengan baik dalam pengelolaan belanja daerah.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, jumlah dana alokasi khusus sebesar 0.184 yang mengartikan bahwa angka tersebut tidak lolos pada uji t dikarenakan lebih dari 0.05 atau 5%. Oleh karena itu, secara hasil pengujian jumlah dana alokasi umum di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai kontribusi dana alokasi khusus terhadap belanja daerah yang nantinya untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.

4. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, jumlah dana perimbangan sebesar 0.006 yang mengartikan bahwa angka tersebut lolos pada uji t dikarenakan kurang dari 0.05 atau 5%. Oleh karena itu, secara hasil pengujian jumlah dana alokasi umum di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini membantu dalam mengevaluasi keberhasilan mekanisme perimbangan tersebut dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Maka dapat diambil dari temuan dan analisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat korelasi yang baik dan patut diperhatikan antara kuantitas pendapatan asli daerah di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Pendapatan asli daerah disini digunakan untuk membangun infrastruktur dan memperkuat kemampuan ekonomi guna mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. selain itu PAD disini juga digunakan untuk mengembangkan berbagai sektor terutama sektor ekonomi seperti pertanian, industri, dan jasa. Dengan demikian Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, pendapatan asli daerah mempunyai dampak yang cukup besar terhadap belanja daerah karena dialokasikan untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah, mengembangkan sektor ekonomi, mengurangi alokasi belanja dan memperbaiki kualitas pembangunan manusia.

2. Jumlah dana alokasi umum di kabupaten bojonegoro dan kabupaten tuban mempunyai hubungan yang positif namun tidak signifikan secara statistik karena kewenangan yang diberikan kepada daerah setelah otonomi daerah dibiayai oleh dana alokasi umum.
3. Jumlah dana alokasi khusus di kabupaten bojonegoro dan kabupaten tuban mempunyai hubungan yang positif akan tetapi tidak signifikan karena pada pengelolaan yang tidak efisien, penggunaan yang tidak terencana, sistem pengawasan yang tidak efektif dan kondisi perekonomian yang kurang stabil sehingga dapat mempengaruhi tingkat signifikansi pada belanja daerah.
4. Jumlah dana perimbangan di kabupaten bojonegoro dan kabupaten tuban mempunyai hubungan yang positif akan tetapi tidak signifikan. Dana perimbangan di kabupaten bojonegoro dan tuban digunakan untuk mengembangkan teknologi seperti informatika dan telekomunikasi sehingga dapat mengurangi kekurangan infrastruktur dan mampu mengubah kondisi ekonomi daerah selain itu juga dana perimbangan digunakan untuk mengembangkan sumber daya alam seperti pertanian, perikanan dan perkebunan yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan mengubah kondisi masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban terdapat korelasi positif antara belanja daerah dengan variabel PAD, DAU, DAK, dan Dana Perimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya masing-masing variabel maka belanja daerah (Y) di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban akan berbeda-beda.

Saran

Analisis lebih lanjut dan menggunakan metode statistik yang lebih kompleks, seperti regresi multivariabel, untuk mengetahui hubungan antara Belanja daerah di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban berkorelasi dengan variabel PAD, DAU, DAK, dan Dana Perimbangan. Selain membantu mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi belanja daerah di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, hal ini juga akan memberikan informasi yang lebih tepat mengenai keterkaitan masing-masing variabel dengan belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- damarinfo.com. (2022). *Berikut Kabupaten di Jawa Timur dengan Persentase Realisasi APBD Terendah Tahun 2022*.
- Darmayuda, M. I., Edy Sujana, S. E., Msi, A. K., ADIPUTRA, I. M. P., SE, S. H., & Si, M. (2015). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA DAERAH (STUDI KASUS PADA KABUPATEN/KOTA DI BALI TAHUN 2010-2013). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 3(1).
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan)*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234>
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 22(2), 197–214. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Inovasi*, 14(1), 44. <https://doi.org/10.29264/jinv.v14i1.3546>
- Ilmu, S., Negara, A., Ilmu, F., Surabaya, U. N., Rahaju, T., Sos, S., & Si, M. (2015). *DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO* Nila Maya Puspita Dewi. 1–7.
- Kotimah, I. K., & MARUF, M. F. (2019). Pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2014-2018 di Kabupaten Bojonegoro. *Publika*. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/28688%0Ahttps://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/28688/26265>
- Salsabillah, A. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Pada Alokasi Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Studi Pada 38 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016). *Jurnal Ilmiah*, 10(2), 1–94. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4829/4235>
- Setiawan, D., & isporima, M. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2019. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(November), 23–36.
- Sugiyono. (2018). Bab Iii (3). *Metodologi Penelitian*, 102.
- Tribudhi, D. A., Hariyanti, D., Rustam, R., Syofyan, S., & Trisakti, U. (2020). *FLYPAPER EFFECT ON REGIONAL SPENDING IN CENTRAL JAVA*. 2020(4), 1053–1059.